



► PEMELIHARAAN ASET

DPRD Kota Jogja Minta Pemkot Turun Tangan

JOGJA—Sejumlah biaya operasional dan pemeliharaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja yang berada di wilayah kelurahan masih ditanggung secara swadaya oleh masyarakat. DPRD Kota Jogja mendorong Pemkot Jogja mengalokasikan anggaran untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja RM Sinarbiyat Nujanat menyoroti biaya operasional dan pemeliharaan balai RW serta balai kampung yang masih dibebankan kepada masyarakat.

Sinarbiyat mengatakan balai RW dan balai kampung merupakan bagian dari aset pemerintah. Karena itu, biaya operasional, seperti listrik, serta pemeliharannya semestinya mendapat dukungan anggaran dari Pemkot Jogja.

“Balai-balai RW, balai kampung itu kan

juga asetnya pemerintah, tapi bayar listrik dan lain sebagainya, pemeliharaan itu masih ditanggung oleh mereka sendiri, masyarakat secara swadaya,” katanya, Minggu (6/9).

Menurut Sinarbiyat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat itu bukan merupakan aset pribadi RW maupun kampung.

“Bukan asetnya RW, bukan asetnya kampung. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai Pemkot Jogja perlu mengevaluasi pola pembiayaan fasilitas tersebut. Balai RW dan balai kampung selama ini menjadi ruang yang digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Sinarbiyat berharap kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas tersebut dimasukkan

dalam perencanaan anggaran Pemkot Jogja. Dengan demikian, masyarakat tidak terus dibebani biaya untuk mengoperasikan dan merawat fasilitas yang merupakan aset pemerintah.

Selain pembiayaan fasilitas masyarakat, Sinarbiyat sebelumnya mendorong Pemkot Jogja memberikan dukungan insentif kepada kader lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan kader yang turut membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat wilayah.

Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat pelayanan di tingkat kampung sekaligus mengurangi beban pembiayaan secara swadaya yang selama ini ditanggung masyarakat. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005